

**SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B  
(Studi Kasus Tahun 2015-2016)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Prodi Peradilan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**RISWAN.R**

**NIM: 10100113062**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISWAN R  
Nim : 10100113062  
Tempat /Tgl. Lahir : Bantaeng, 18 Agustus 1994  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : PERAN ADVOKAT NON MUSLIM DALAM  
MENDAMPINGI PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS  
I B

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS 2015-2016)”** adalah benar hasil karya penyusun sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Sungguminasa, 1 Februari 2019 M  
25 Jumadil Awal 1440 H

Penyusun

RISWAN R

NIM: 10100113062

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul “SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIA DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (Studi Kasus Tahun 2015-2016)” yang disusun oleh Riswan.R, NIM: 10100113062, Mahasiswa Pro Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara seksan serta disetujui untuk diseminarkan (seminar proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Januari 2018 M  
7 jumadil Awal 1439 E

Pembimbing I

**Dr. Dra. Hj. Hartini, M.H.I**  
NIP. 195706271991032001

Pembimbing II

**Musfika Ilyas, S.H.I, M.H.I**  
NIP. 196910042000031002

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan

**Dr. H. Supardin, M.H.I.**  
NIP. 196503021994031003

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (Studi Kasus Tahun 2015-2016)", yang disusun oleh Riswan. R, NIM: 10100113062, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 Maret 2019 M  
28 Jumadil Akhir 1440 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Musyfikah Ilyas, M.H.I.	(.....)

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa, cinta kasih sayang yang tak bertepi dn tak bermuara, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Rasidong dan Ibunda Rahma, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari-saudariku yang tercinta: Irfan dan Risal, beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada

tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. H. Supardin M.H.I.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Ibunda **Dr. Hj. Hartini, M.H.I.** selaku pembimbing I dan Kakak **Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I.** selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, dari **Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B** yakni **Drs. Machmud, Isma, S. Sos, M. Si. , Saufa Jamilah, S.H. , Hj. St. Dra. Sitti Johar , Soenandar, A.Md. , Dra. Nuraeni dan Andi. Suardi, S.Ag,** yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;

7. Kepada seluruh Kader **Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Gowa Raya** dan terkhusus **HmI Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya** serta **Korps HMI-Wati (KOHATI) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya** yang juga selalu memberi semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga Besar **Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi Dan Hukum (SIMPOSIUM)**.
9. Seluruh **Kader Himpunan Pelajarar Mahasiswa Bantaeng Raya (HPMB-Raya)** dimanapun berada.
10. Saudara seperjuangan kakanda, Ayunda dan Kawan-Kawan, Ayunda **Erni W S Syam, Kakanda Kurniadi Nur. SH., MH.,** Ikhsan Akbar, **Bun Akbar, Bung Nandar,** dan yang saya tidak sebutkan namanya, terima kasih
11. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 **Khususnya Muh. Sahrul S.H , Ilham S.H, Munanda, SH. Fathonaddin, SH., Najamuddin, SH., Andi Haerur Rijal, SH., Urikha, Ahmad Nur Syamsir, Budi, SH., Ardhiansyah. SH., Muh. Risal, SH., Muh. Ikho Hasmunir, SH., Muh. Idham Dzulhaj, SH., Sitti Wulandari , SH. , Muhammad Nurhadi, SH., Muhammad Firman Rusyaid, Muh. Mahdi Muchtar, Muh. Alif Ibnu Khaidir dan Miftahul Khair** terlebih buat saudara seperjuangan teman-teman kelas Peradilan Agama (B) tanpa terkecuali. Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.
12. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga

Sungguminasa, 1 Februari 2019 M  
25 Jumadil Awal 1440 H

Penyusun

RISWAN R  
NIM. 10100113062





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Tujuan dan Kegunaan.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Perceraian ( <i>Talak</i> ).....	7
1. Pengertian Perceraian ( <i>Talak</i> ) .....	7
2. Dasar Hukum .....	11
3. Alasan-alasan Perceraian.....	15
4. Macam-macam Perceraian .....	17
5. Akibat Hukum Perceraian ( <i>Talak</i> ).....	21
6. Faktor Umum Penyebab Perceraian .....	24
7. Dampak Perceraian.....	27
B. Kompetisi Peradilan Agama .....	32
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	33

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	36
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B.	Pendekatan Penelitian.....	36
C.	Sumber Data .....	37
D.	Metode Pengumpulan Data .....	37
E.	Instrumen Penelitian .....	38
F.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	38
BAB IV	SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS 2015- 2016).....	39
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng.....	39
1.	Sejarah Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng .....	39
2.	Struktur Organisasi (TUPOKSI) .....	41
3.	Profil Sumber Daya Manusia .....	42
4.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia .....	50
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B .....	56
a.	Ekonomi.....	56
b.	Pendidikan .....	57
c.	Perjodohan.....	66
d.	Rendahnya Pendidikan .....	67
C.	Upaya Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam Menangani dan Menekan Jumlah Kasus Perceraian .....	67
a.	Mediasi .....	68
b.	Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin.....	68

BAB V	PENUTUP .....	69
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Implikasi Penelitian .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		77



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik



غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ﺥ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *husus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



## ABSTRAK

NAMA : RISWAN.R

NIM : 10100113062

JUDUL SKRIPSI : SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS  
2015-2016)

---

Skripsi ini membahas SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS 2015-2016), Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Namun, Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri bisa diakibatkan oleh talak dan bisa juga diakibatkan oleh perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B Tahun 2015-2016 cukup tinggi, dan tingkat perceraian yang paling tinggi adalah gugat cerai, dimana seorang isterilah yang menggugat cerai suaminya. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa data perceraian yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B Tahun 2015-2016 adalah berjumlah kira-kira kurang lebih 500 orang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan, memperoleh data lengkap dan valid mengenai SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS 2015-2016). Pendekatannya adalah yuridis-empiris yakni mengkaji data yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum positif dan hukum Islam. Teknik pengumpulan datanya adalah *interview*. *Interview* ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan 2 orang Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B, Panitera Muda 2, 1 Staf Pengadilan dan 1 Sekertaris.

Hasil penelitian ini menunjukkan antara lain (1). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya Kasus perceraian di pengadilan Agama Bantaeng adalah Ekonomi, Perselingkuhan, Perjudohan dan Rendahnya pendidikan., (2). Upaya hakim pengadilan agama bantaeng dalam menangani dan menekan jumlah kasus perceraian adalah Mediasi dan Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin. Implikasinya ialah (1). Para hakim dalam menangani kasus gugatan perceraian diharapkan untuk tidak memudahkan perceraian dan berusaha untuk mengakurkan kembali kedua pasangan., (2). Diperlukan sosialisasi kembali kepada para CALON PENGANTIN tentang pendidikan pra nikah yang dilakukan oleh KUA.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.<sup>1</sup>

Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami - istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h .249.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalidzan (perjanjian yang kuat), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian.

Perceraian itu sendiri adalah: putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan antara suami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, dan barulah terjalinnya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri.

Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan isteri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga adalah, minimnya ekonomi, komunikasi pasif, perbedaan pendapat, tidak konsekuensi, perselingkuhan, masalah nafkah batin,

---

<sup>3</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h.18-19.

kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurang perhatian, saling curiga, sering bertengkar, intimidasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Perceraian yang terjadi antara suami dan isteri bisa diakibatkan oleh talak dan bisa juga diakibatkan oleh perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B Tahun 2015-2016 cukup tinggi, dan tingkat perceraian yang paling tinggi adalah gugat cerai, dimana seorang isterilah yang menggugat cerai suaminya.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa data perceraian yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B Tahun 2015-2016 adalah berjumlah kira-kira kurang lebih 500 orang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (Studi Kasus tahun 2015-2016)”**

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Peneliatan**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada Penyebab Tingginya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B” (Studi Kasus Tahun 2015-2016).

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman serta memberikan presepsi yang sama antara penulis dengan pembaca dan memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpansiuran dalam pembahasan selanjutnya.

---

<sup>5</sup> [www.pelangiblog.com](http://www.pelangiblog.com), 11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga



Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. perceraian merupakan satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Tingginya Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bantaeng. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di pengadilan Agama Bantaeng ?
2. Bagaimana upaya hakim pengadilan agama Bantaeng dalam menangani dan menekan jumlah kasus perceraian ?

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan skripsi agar dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan maka skripsi ini harus di dukung oleh beberapa sumber rujukan atau literatur sebagai titik tolak untuk berfikir ilmiah dan juga kajian kepustakaan dapat validitasnya sebagai sebuah data. Sehingga data dalam sebuah kajian semakin valid untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi agar dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan maka skripsi ini harus di dukung oleh beberapa

---

sumber rujukan atau literatur sebagai titik tolak untuk berfikir ilmiah dan juga kajian kepustakaan dapat validitasnya sebagai sebuah data. Sehingga data dalam sebuah kajian semakin valid untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi karya ilmiah:

Adapun referensi yang menjadi rujukan awal diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang berjudul “Penyebab Pada Perceraian Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)” yang dikaji oleh Ismi Abdullah dalam skripsi ini membahas tentang penyebab perceraian hanya berfokus pada pengadilan agama makassar.

Sumira dalam skripsinya “Perkara Perceraian Karena Nafkah (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Soppeng) dalam skripsi ini berfokus pada satu penyebab perceraian karna nafkah tidak membahas penyebab lain dan juga penelitian hanya pada lingkungan pengadilan agama kabupaten soppeng.

Skripsi lain yang berkenaan dengan perceraian yaitu oleh Mulki dengan judul “ Penyebab Terjadinya Cerai Thalak di Pengadilan Agam Sungguminasa Kabupaten Gowa” dalam skripsi ini hanya membahas tentang cerai thalak tidak dengan cerai gugat dan tidak membahas tentang penyebab terjadinya perceraian.

Dengan demikian penilitian yang akan dilakukan peneliti merupakan penelitian yang baru karena tidak ada literatur ataupun buku yang membahas tentang Penyebab Tingginya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas IIB (Studi Kasus Tahun 2015-2017).

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penulisan**

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini untuk menambah pengetahuan atau pemahaman mengenai permasalahan pada judul diatas, adapun tujuan utamanya antara lain :

- a. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di pengadilan Agama Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya hakim pengadilan agama bantaeng dalam menangani dan menekan jumlah kasus perceraian.

## 2. Kegunaan

Sebagaimana mestinya suatu penelitian tentu mempunyai mamfaat atau kegunaan. adapun antara lain :

- a. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan masukan positif serta mampu menghasilkan pradigma baru, dan memberikan sumbangsi pemikiran kepada peneliti-peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti sebagai sumber maklumat tentang cara menangani dalam mengatasi peningkatan jumlah perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Perceraian (*Talak*)

##### 1. Pengertian Perceraian (*Talak*)

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan *talak*, sedangkan kata *talak* sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>2</sup>

*Talak* secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* (اطلاق), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *talak* yaitu “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.<sup>3</sup>

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”<sup>4</sup>

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208.

<sup>2</sup>Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 35.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 192.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 192.



dalam hal *talak ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam *talak raj'i*.<sup>5</sup>

Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 187, 2:187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّشْرُوهِنَّ وَأَبْتَدُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا لَكُمْ الْخَيْطُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 192.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2009), h. 297.

Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.<sup>7</sup>

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.<sup>8</sup>

*Khulu'* berasal kata خلع yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Alasannya karena istri adalah pakaian suami, dan sebaliknya. Sebagaimana dalam Surat al-Baqarāh ayat 187.<sup>9</sup> Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian tersebut dari suaminya. *Khulu'* merupakan satu bentuk perceraian yang di dalamnya seorang perempuan melepaskan diri dari perkawinannya dengan membayar *'iwaḍm* kepada suaminya.

Ulama menggunakan beberapa kata untuk maksud yang sama arti dengan *khulu'*, seperti *fidyah* (فدية) berarti tebusan), *ṣulh* (صلح berarti perdamaian), *mubarra'ah* (مبراءة) yang berarti melepaskan diri).<sup>10</sup> Meski memiliki makna yang sama, namun dibedakan berdasarkan jumlah ganti rugi atau *'iwaḍ* yang

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. V; Bandung: Syamil Qur'an, 2009), Q.S. al-Baqarah 2;187, h.29.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, h. 297.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 424.

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), h. 60.

digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan ialah seluruh mahar yang diberikan ketika menikah, maka disebut dengan *khulu'*. Apabila ganti rugi tersebut hanya separuh dari mahar, maka disebut dengan *ṣulh*. Apabila ganti rugi tersebut lebih banyak dari mahar, maka disebut dengan *fidyah*. Bila istri bebas dari ganti rugi disebut dengan *mubarra'ah*.<sup>11</sup> *Khulu'* dalam Islam dikenal pula dengan sebutan talak tebus, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami, *Khulu'* terjadi karena adanya kamauan dari pihak istri dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>12</sup> Terdapat beberapa definisi berkaitan dengan *khulu'*, yakni sebagai berikut:

- 1) Para *fuqohā'* mendefinisikan *khulu'* sebagai talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan pemberian tebusan yang diterima oleh suami.<sup>13</sup>
- 2) Menurut Imam Syaukani (pengarang kitab *Nailul Autharsyarh Muntaqal Akhbar*), *khulu'* ialah  
 “Peceraian suami dari istrinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) yang diperolehnya”.<sup>14</sup>
- 3) Menurut Syaibani al-Khatib (pengarang kitab *al-Jami'al-Kabir*), *khulu'* ialah  
 “Peceraian antara suami istri, walaupun dengan lafadz (ungkapan kata-kata) tebusan, dengan ganti rugi yang dimaksudkan kembali kepada suami”.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 231.

<sup>12</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 17.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 425.

<sup>14</sup>H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 96.

<sup>15</sup>H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, h. 96.

Berdasarkan penjabaran pengertian tersebut, maka khulu'dapat disebut sebagai perceraian yang diajukan oleh istri dengan lafaz talak maupun *khulu'*, dan membayar *'iwaq* kepada suami.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.<sup>16</sup>

Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum

Perceraian Lafadz talak telah ada sejak zaman *jahiliyah*. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman *jahiliyah* menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada

---

<sup>16</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. 34; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 549.

<sup>17</sup><http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 15.00 WITA).

Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.<sup>18</sup> maka turunlah firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahnya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”

Mengenai perceraian Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih).<sup>19</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>20</sup> Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Terjemahnya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islami*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, h. 255-256.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 220.

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarāh, 2: 229)<sup>21</sup>

Adapun dasar hukum dari hadis yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah SAW. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

Artinya: “Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW. : Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu.”<sup>22</sup>

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Cet. I; Volume 1; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 600.

<sup>22</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, (Juz VI, Semarang: Toha Putra), h. 170.

pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.<sup>23</sup>

Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»

Artinya:“Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:<sup>25</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

<sup>23</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 356.

<sup>24</sup>Abu Daud, Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azadi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Cet. I; Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.), h. 255.

<sup>25</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 549.



Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 Tentang KHI, yaitu:<sup>26</sup>

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

### **3. Alasan-alasan Perceraian**

Pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>28</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

---

<sup>26</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VI; Bandung: Citra Umbara), h. 268.

<sup>27</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 268.

<sup>28</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 268-269.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu:<sup>29</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima)tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>29</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 268-269.

4. Salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturantersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.

#### 4. Macam-Macam Perceraian

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Cerai raj'iy* atau *Talak raj'iy* yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah.<sup>30</sup>
- b. *Cerai ba'in* atau *Talak ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.<sup>31</sup>

*Talak* ini terbagi ke dalam dua macam yaitu:

1. *Al-ba'in baymunah al-sugra* yaitu *talak Ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 220.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 221.

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun berakhir masa iddahnya akibat memutuskan tali suami istri saat talak diucapkan.<sup>33</sup> Termasuk talak *al-ba'in baynunah al-sugra* adalah:

- a. Perceraian yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami.
  - b. Perceraian yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*
  - c. Perceraian melalui putusan pengadilan atau disebut faskh.
  - d. Perceraian karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau yang semacamnya.<sup>34</sup>
2. *Al-ba'in baynunah al-kubra* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suami kedua serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. *Talak Al-ba'in baynunah al-kubra* ini terjadi pada talak yang ke tiga.<sup>35</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 221.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

<sup>35</sup> Hamdani, *Risalah Nikah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 240.

Terjemahnya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.<sup>36</sup>

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>37</sup>

- a. *Cerai Sarih* atau *Talak sarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk *talak sarih* ada tiga, yaitu: *talaq*, *firaq* dan *sarah*. dan ketiga kalimat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadist.
- b. *Cerai kinayah* atau *Talak kinayah*, yaitu: talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti, engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu' ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan dengan

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 56.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 194.

kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Cerai dengan ucapan.
- b) Ceraian dengan tulisan.
- c) Cerai dengan isyarat.
- d) Cerai dengan putusan.

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya *cerai* atau *talak*, terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>38</sup>

- a. *Cerai sunniy* atau *Talak sunniy*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan *talak sunniy* jika memenuhi empat syarat, yaitu:
  - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunniy.
  - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.
  - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
  - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak termasuk *talak sunniy*.
- b. *Cerai bid'iy* atau *talak bid'iy* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *talak sunniy* dan termasuk *talak bid'iy* ialah:

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 221.

- a) talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- b) talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c) *talak la sunniy wala bid'iy* ialah talak yang tidak termasuk kategori *talak sunniy* dan *talak bid'iy*, yaitu:
  - a. talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
  - b. talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid
  - c. talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

#### 5. Akibat Hukum Perceraian (*Talak*)

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat Hukum yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, terutama di dalam masa iddah. Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Jika suami menceraikan istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya.
- 2) Apabila seorang suami menceraikan istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
- 3) Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Talaq ayat 2, yaitu:

---

<sup>39</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 267.



فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ  
 مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٤٠﴾

Terjemahan:”apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>40</sup>

Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Akan tetapi perceraian disini diperbolehkan apabila ada suatu hal yang mana akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Di jelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu<sup>41</sup>.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara lima tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surat at-Talaq ayat 2, h. 123.

<sup>41</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) Kompilasi Hukum Islam (Pasal 113) Wacana Intelektual, 2007, h. 205.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *ta'lik talaq*
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengandung asas mempersulit terjadinya perceraian oleh pasangan suami istri.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. definisi perceraian di Pengadilan agama itu dilihat dari putusannya perkawinan. Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan yaitu :

1. karena kematian.
2. karena perceraian.
3. karena putusan pengadilan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Artikel perceraian <https://www.scribd.com/doc/257942953/Artikel-Perceraian> (14 Agustus 2017).

## 6. Faktor Umum Penyebab Perceraian

Berikut beberapa penyebab umum terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga :

### a. Minimnya Ekonomi

Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami istri.

### b. Komunikasi Pasif

Komunikasi pasif antara suami dan istri juga sering menimbulkan masalah yang merujuk pada perceraian. Banyak perceraian terjadi di masyarakat karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Jalan utama untuk mengatasi komunikasi pasif adalah mencoba untuk melakukan komunikasi aktif dan bersifat terbuka.

### c. Perbedaan

Sering kali sebuah perbedaan menyebabkan seseorang melepas hubungan dengan orang lain tanpa toleransi terlebih dahulu. Seharusnya perbedaan menjadikan seseorang mengerti kekurangan antar satu dengan lainnya dan mewujudkan solusi untuk bersatu dan saling mengisi, bukan menjadikan perpisahan dan perpecahan. Contoh perbedaan dalam masalah pernikahan bisa seperti :

Perbedaan faham dan keyakinan, Perbedaan ide dan pemikiran, Perbedaan status sosial dari masing-masing keluarga (kaya dan miskin), dan lain-lain.

d. Tidak Konsekuensi

Menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Jika rasa konsekuensi ini hilang, maka sangat mudah terjadi perceraian. Contoh tindak tidak konsekuensi dalam pernikahan adalah :

- Mencintai pihak ketiga
- Suami mengabaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah
- Istri tidak menjaga kehormatan dan martabat keluarga dan lain-lain.

e. Perselingkuhan

Selingkuh adalah sebuah penghianatan dalam rumah tangga. Semua orang tidak menginginkan orang yang dicintai melakukan perselingkuhan kepada orang lain. Tentu saja hal ini menyebabkan luka dalam yang membekas di hati. Luka karena mereka dihianati akan menyebabkan keputusan dini tanpa pertimbangan terlebih dahulu, yaitu perceraian.

f. Masalah Nafkah Batin

Nafkah batin atau seks adalah salah satu alasan penting mengapa seseorang melangsungkan pernikahan. Selain kebutuhan dhoir, kebutuhan batin pun harus terpenuhi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Terkadang ketidakpuasan dalam nafkah batin menyebabkan seseorang

melakukan perselingkuhan, dan tentu titik fatal dari masalah ini adalah perceraian.

g. Kesibukan Pekerjaan yang Berlebihan

Sibuk bekerja membuat kedua pihak (suami dan istri) jarang melakukan komunikasi aktif. Aktifitas pekerjaan yang berlebihan membuat lelah, saat pulang bekerja keduanya mungkin akan menghabiskan waktu untuk istirahat. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak harmonis, apalagi ketika beban pekerjaan semakin bertambah dan menumpuk. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran.

h. Kurangnya Perhatian

Manusia memiliki watak senang diperhatikan, diakui, dicintai, dan disayangi. Jika dalam keluarga salah satu pasangan mendapatkan perhatian kurang, maka bunga kemesraan dalam rumah tangga pun akan layu. Dan tentu saja hal ini bisa memperbesar peluang perceraian antara keduanya.

i. Saling Curiga

Mencurigai pasangan adalah sebuah penyakit yang harus diobati karena ini akan menimbulkan prasangka buruk, menuduh, dan fitnah dalam keluarga. Sifat ini biasanya dimiliki oleh pasangan yang protektif.

j. Sering bertengkar

Pertengkaran dalam rumah tangga pasti dialami oleh banyak orang. Pertengkaran kecil sebaiknya tidak dianggap remeh, apalagi jika watak keduanya (suami dan istri) mudah tersinggung dan sulit untuk berdamai, tentu ini akan sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang bernada

perceraian. Jika pertengkaran suami istri sering terjadi, maka akan sangat mudah mereka untuk bercerai.

k. Intimidasi dan tindak kekerasan

Intimidasi atau perkataan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istri dapat mematikan keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi jika sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri adalah manusia yang mempunyai perasaan dan hati, intimidasi dan kekerasan akan membuatnya lebih memilih memutuskan hubungan perkawinan daripada bertahan.<sup>43</sup>

## 7. Dampak Perceraian

Berikut beberapa dampak yang timbul akibat perceraian adalah :

a. Traumatik

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan (Tomlinson & Keasey, 1985).

Hurlock (1996) dampak traumatik dari perceraian biasanya lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial.

---

<sup>43</sup>Faktor umum penyebab perceraian <http://www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html> (14 agustus 2017)

Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis. (Coombs & Guttman, dalam Santrock. 2002). Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

Hurlock (1996) dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.

#### b. Perubahan Peran dan Status

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka (Schell & Hall, 1994). Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.



Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kekecewaan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya.

Menurut Campbell (dalam Schell & Hall, 1994) orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda/duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.

#### c. Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita

yang diceraikan cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang diceraikan atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup (Hurlock,1996)

Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhirinya dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Hozman dan Froiland (*dalam* Hurlock, 1996) menjelaskan tentang kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian. Mereka membagi 5 tahap penyesuaian setelah terjadinya penyesuaian yaitu

1. menyangkal bahwa ada perceraian,
2. timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat,
3. dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk tidak bercerai,
4. mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga,
5. dan akhirnya mereka setuju untuk bercerai.

Dampak perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang hendak bercerai

(Papalia & Diane, 2001). Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini, khususnya jika anak-anak memandang bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan kognitifnya.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi.

Namun banyak wanita dan pria yang merasa beruntung dengan adanya perceraian, dengan pengertian bahwa perceraian tersebut memberikan kesempatan pada mereka untuk memulai hidup yang baru (Hurlock, 1996). Hetherington dan kawan-kawan (Hurlock, 1996), menjelaskan bahwa pasangan yang bercerai pada umumnya berharap tekanan dan konflik batin berkurang dapat menikmati kebebasan lebih besar dan akan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Studi tentang akibat perceraian pada anggota keluarga membawa dampak yang sangat besar, terutama pada tahun pertama setelah perceraian kemudian bertahap akan terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang ada dalam keluarga.

#### **B. Kompetensi Peradilan Agama**

Kekuasaan badan peradilan agama dibagi atas kewenangan Relatif dan Kewenangan absolut serta kewenangan peradilan agama tidak meliputi sengketa hak milik. Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang

yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan pengadilan agama Bogor.<sup>44</sup>

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman tergugat, kepada salah satu tergugat jika tergugat terdapat lebih dari satu, ditempat tinggal penggugat jika keberadaan tergugat tidak diketahui dan tidak dikenal, ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda yang tidak bergerak, apabila objeknya berupa benda tak bergerak, dan gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih, apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama yaitu mengenai perkara-perkara yang dapat diselesaikan seperti mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sedekah, dan ekonomi syari'ah seperti yang tertuang dalam pasal 49 sampai 53 Bab III Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan perkawinan di jelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 diantaranya izin beristri lebih dari satu, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak dan sebagainya.<sup>45</sup>

Kewenangan bidang kewarisan menurut pasal 49 (3) ialah;  
 Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan tersebut dan kewenangan absolut lainnya adalah wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 87.

<sup>45</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 94.

<sup>46</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, h. 9.

### ***C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama***

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat, Pengadilan Agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri, selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Untuk melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan, sudah ada petugas Jurusita. Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Departemen Agama RI dan secara teknis Yustisial mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama. Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang memadai, namun kualitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B sama dan sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut harus melaluisseleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang. Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B selalu ditingkatkan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> <http://www.pa-bantaeng.go.id/sejarah.html>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama selain memiliki kekuasaan relatif seperti disebutkan, juga mempunyai kekuasaan mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Kewenangan kekuasaan mutlak ini diatur pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Memperhatikan peraturan di atas, begitu banyak bidang perkara yang harus ditangani oleh pengadilan agama apabila ini menjadi masalah perselisihan para pihak. Salah satu kewenangan peradilan Agama adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis atau keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.<sup>48</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

---

<sup>48</sup>Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 18



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif atau metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang menyangkut peran advokat non muslim dalam mendampingi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan peran advokat non muslim dalam perkara perceraian.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau yuridis-empiris yaitu mengkaji undang-undang dan beberapa sumber hukum lainnya khususnya yang berkaitan tentang Signifikasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B tahun 2015-2016.

### **C. Sumber Data**

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai Signifikasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B tahun 2016-2017, yang dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara (*interview*) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yaitu hakim dan advokat yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.
2. Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari catatan dan arsip-arsip yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Studi kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencacatan terhadap dokumen-dokumen penting serta bahan bacaan lain yang mendukung objek penelitian.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk membantu proses penelitian seperti pulpen, buku, flesdisk, kamera, alat perekam suara (handphone) dan lain-lain.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

##### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Studi kepustakaan merupakan upaya mencari data sekunder yakni melalui berbagai buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, jurnal ilmiah, dan data-data internet.

##### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terpilih sebagai responden.

#### **2. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

**BAB IV**  
**SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN**  
**DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B**  
**(STUDI KASUS 2015-2016)**

**A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng***

**1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas II B Bantaeng**

Jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng yang diakui secara resmi oleh pemerintah, masyarakat Bantaeng mayoritas beragama Islam. Jika harus menyelesaikan berbagai persoalan hukum, baik perdata maupun pidana biasanya diselesaikan melalui ulama setempat. Masyarakat Islam Bantaeng, memang terbilang masyarakat yang agamis. Taat dan patuh menjalankan agama yang dianutnya, serta sangat menjunjung tinggi dan menghargai eksistensi para ulama sebagai tokoh masyarakat yang kharismatik. Oleh karena itu, ulama memegang peran penting. Di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ditanyakan dan diajukan oleh ulama untuk penyelesaiannya dan apapun yang diputuskan oleh ulama pasti menjadi pedoman bagi mereka.

Kondisi dan alur penyelesaian setiap persoalan yang diperhadapkan kepada ulama, tidaklah seformal dengan saat ini, ketika itu para ulama yang difungsikan sebagai qadhi (hakim), biasanya menjadikan serambi mesjid sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan kadang-kadang mereka melayani masyarakat di rumah mereka sendiri.

Keadaan dan tata cara penyelesaian persoalan masyarakat Islam seperti ini terus berlanjut, hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia menyadari betapa masyarakat muslim sangat

membutuhkan lembaga peradilan yang resmi, Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura, Melalui Peraturan Pemerintah inilah Pengadilan Agama Bantaeng merupakan salah satu dari sejumlah Pengadilan Agama yang secara resmi dinyatakan berdiri.

Pengadilan Agama Bantaeng, sejak secara resmi berdiri hingga saat ini telah dipimpin oleh 11 (sebelas) orang Ketua dan seorang pelaksana tugas. Terdiri dari :

1. KH. Abd. Djabbar (1962-1978)
2. Hj. Sitti Hasan (1978-1979)
3. KH. Zainul Abidin (1979-1982)
4. Drs. M. Thahir Hasan (1983-1991) dan Drs. Umar Najamuddin (1991-1993) *Pelaksana Tugas*
5. Drs. Tahir. R (1993-1998)
6. Drs. Syarkawi (1998-2005)
7. Drs. H.M Nahiruddin Malle, S.H., MH. (2005-2006)
8. Drs. Sanusi Rabang, S.H., M.H. (2006-2009)
9. Drs. Hasbi Kawu, MH. (2009 - 2013)
10. H. Muh. Ramli HT, S.H. M.H. (2013 - 2014)
11. Drs. Hasbi, M.H. (2014 – 2017)
12. Drs. H. M Amir, S.H. (2017- sekarang)

Pertama berdirinya Pengadilan Agama Bantaeng di Bissampole, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang pada waktu itu yang menjadi ketuanya adalah KH. Abd. Djabbar pada tahun (1962-1978) bangunannya masih berbentuk rumah panggung, selanjutnya kantor Pengadilan Agama Bantaeng berpindah tempat di Jalan Merpati Baru yang pada waktu itu di ketuai oleh Hj. Sitti Hasan pada tahun (1978-1979) kemudian setelah itu pindah lagi berkantor disebuah Balai Sidang yang terletak di Jalan Andi Mannappiang Nomor 1 Bantaeng. Sebuah bangunan kecil yang dibiayai oleh Departemen Agama sebagai Departemen Induk yang membawahi Pengadilan Agama, kini dengan sistem satu atap semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sejak tanggal 25 Maret 2010 Pengadilan Agama Bantaeng secara resmi menempati sebuah kantor yang bagus dengan luas yang memadai setelah kantor tersebut diresmikan secara simbolis dengan sejumlah Kantor Pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang pembangunannya selesai diakhir tahun 2009. Peresmian yang dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada waktu itu DR. Harifin A.Tumpa, SH di Pontianak, Kalimantan Barat. Kantor tersebut tetap beralamat di Jalan Andi Mannappiang Nomor 1 Bantaeng sampai sekarang.<sup>1</sup>

## **2. Struktur Organisasi (TUPOKSI)**

Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bantaeng termasuk Pengadilan Kelas II B.

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Bantaeng Tgl 4 April 2018

Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Susunan organisasi Pengadilan Agama Bantaeng terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, untuk lebih terperinci/detail dapat dilihat pada Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantaeng sebagai berikut:



### 3. Profil Sumber Daya Manusia

Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Agama Bantaeng terdiri dari :

Jumlah Hakim sebanyak 8 orang (Termasuk Ketua dan Wakil Ketua) yang terdiri dari : No. Nama / NIP Pangkat Gol/Ruang Pendidikan

No	Nama/Nip	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan	Jabatan
1	Drs. H. Muh. Amir, S.H.  NIP.19640804.199403.1.005	Pembina TKI/IVb	Sarjana	Ketua
2	Ruslan saleh S, S.H.  NIP.19621231.199403.1.033	Pembina TKI/IVb	Sarjana	Wakil Ketua
3	Dra. Sitti Johar  NIP.19660721.199403.2.002	Pembina TKI/IVb	Sarjana	Hakim
4	Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H	Penata Tk. I	Sarjana	Hakim



	NIP.19800504.200312.1.002	/III/d		
5	Ruslan Saleh, S.Ag.  NIP.19760506.200502.1.001	Penata  /III/c	Sarjana	Hakim
6	Musrifah, S.H.I  NIP.19810323.200704.2.002	Penata  /III/c	Sarjana	Hakim
7	St. Hatijah, S.HI.  NIP.19860507.200904.2.006	Penata  MudaTk.  /III/b	Sarjana	Hakim
8	Aminah Sri Astuti H.S. S.EI  NIP.19840828.200904.2.012	PenataMuda  Tk. I  /III/b	Sarjana	Hakim

Jumlah Panitia Pengganti sebanyak 11 orang ( termasuk Panitia,  
Wakil Panitia, Panitia Muda) yang terdiri dari :

No	Nama / NIP	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan	Jabatan
1	H.A. Syamsul Bahri, S.H.M.H.  NIP.19560809.198003.1.05	Pembina  / IV/a	Sarjana	Panitera
2	Dra. Hj. Nawiyah  NIP.19611231.199203.2.01	Penata Tk.I/  III/d	Sarjana	Wakil Panitera
3	Dra. Hj. St. Nuraeni  NIP.19660808.199402.2.01	Penata Tk.I/  III/d	Sarjana	Panmud Permoh onan

4	H. Erwin Amir Betha, S.H  NIP.19711017.200112.1.05	Penata Tk. I  III/d	Sarjana	Panmud  Gugatan
5	Andi Suardi, S.Ag  NIP.19731105.200112.1.01	Penata Tk. I  III/d	Sarjana	Panmud  Hukum
6	Bungatang, S.HI  NIP.19760707.199703.2.02	Penata  Muda  Tk. III/b	Sarjana	Panitera  Penggana  ti
7	Saufa Jamilah, S.H  NIP.19780607.200904.1.03	Penata  Muda  Tk. I  III/b	Sarjana	Panitera  Penggana  ti
8	Taufik, S.H.	Penata /	Sarjana	Panitera

	NIP.19780220.200604.1.03	III/a		Penggan ti
9	Ridwan, S.H.  NIP.19770408.201212.1.02	Penata /  III/a	Sarjana	Panitera Penggan ti
10	Muh. Luthfi Usman  NIP.19830610.200604.1.02	Penata /  III/a	Sarjana	Panitera Penggan ti
11	Marianti, S.HI  NIP.19841020.200912.2.03	Penata /  III/a	Sarjana	Panitera Penggan ti

Jurusita (1) orang dan Juru sita Pengganti sebanyak (1) orang yaitu :

No	Nama / NIP	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan	Jabatan
----	------------	----------------------	------------	---------

1	Muhammad Ramli, S.Pd.  NIP.19771014.200604.1.01	Penata Muda Tk. I III/b	Sarjana	Juru Sita
2	Ansor  NIP.19660827.199402.1.01	Penata Muda Tk.I / III/b	SMA	Jurusita Pengganti

Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak 6 orang terdiri dari :

No	Nama / NIP	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan	Jabatan
1	Drs. Mahmud NIP.19611231.200003.1.2	Penata Tk. I III/d	Sarjana	Sekretaris
2	Haripuddin. S.H.	Penata Tk. I III/d	Sarjana	Kasubag Kepegawaian

	NIP.19750115.200112.1.6			Organisasi dan Tata Laksana
3	Ansor  NIP.19660827.199402.1.1	Penata Muda Tk. I  III/b	SMA	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
4	Mulyani, S.E  NIP.19831015.200904.2.7	Penata Muda Tk. IIII/b	Sarjana	Kasubag Umum dan Keuangan
5	Isma, S.Sos. M.Si  NIP.19751202.200604.2.7	Penata Tk. I  III/d	Sarjana	Staf
6	Dadang Soenandar, A.Md	Pengatur  II/c	Sarjana	Staf

	NIP. 19881221 201603 1 001			
--	-------------------------------	--	--	--

#### 4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dalam tahun 2016 kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bantaeng masih membutuhkan Staf TI agar tuntutan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja, tugas pokok dan fungsi telah berjalan dengan efektif.

##### 1. Mutasi

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bantaeng terdapat 2 orang telah mendapat mutasi masuk dan terdapat 1 orang mutasi keluar :

##### Mutasi masuk

No	Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	M. Arfah, S.H NIP.19560809.198003. 1.005	Penata Tk.I/ III/d	Sarjana
2	Muh. Amin T, S.Ag.,S.H NIP.19761009.200604.	Penata /III/c	Sarjana

	1.002		
--	-------	--	--

## Mutasi keluar

No	Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Askar  NIP.19670827.199402. 1.002	Kaur Kepegawaian PA. Bantaeng	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan PA. Sinjai

## 1. Promosi:

Mengusulkan kenaikan pangkat regular/pilihan periode April 2016 dan Oktober 2016 atas nama :

No	NAMA/NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Musrifah, S.H.I  NIP.19810323.200704.	Penata Muda Tk.I  III/b	Penata  III/c



	2.002		
2	H. Erwin Amir Betha, S.H  NIP.19711017.200112.  1.005	Penata  III/c	Penata Tk. I  III/d

Pada tahun 2016 melaksanakan Pelantikan Pejabat Struktural atas nama:

No	NAMA/NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Mulyani, S.E  NIP.19831015.200904.  2.007	Kaur Keuangan  PA.  Bantaeng	Kasubag Umum dan Keuangan  PA.Bantaeng
2	H. Erwin Amir Betha, S.H  NIP.19711017.200112.  1.005	Kaur Umum  PA.  Jeneponto	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana  PA. Bantaeng

## 2. Pensiun

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Bantaeng terdapat 1 orang Pegawai Negeri Sipil yang pensiun<sup>2</sup>

No	NAMA/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	M. Arfah, S.H  NIP.19560809.198003. 1.005	Panitera  PA.  Bantaeng	Panitera  PA.  Bantaeng

### B. Rekapitulasi perkara (2015-2016)

#### 1. Rekapitulasi Perkara

Pada Tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak **528** perkara sedangkan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 49 perkara, dengan demikian maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2015 sebanyak **577** perkara yang perinciannya sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	PUTUS TAHUN 2015
1	PEMBATALAN PERKAWINAN	1
2	CERAI TALAK	41

<sup>2</sup>Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantaeng 2017

3	CERAI GUGAT	209
4	DISPENSASI KAWIN	24
5	HIBAH	-
6	PENETAPAN AHLI WARIS	1
7	WALI ADHOL	2
8	KEWARISAN	2
9	ITSBAT NIKAH	210
10	HARTA BERSAMA	-
11	PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	1
12	PENGANGKATAN ANAK	1
13	PERKARA DICABUT	7
14	PEKKARA DITOLAK	3
15	GUGUR	14
16	DICORET	17
17	TIDAK DITERIMA	6
	J U M L A H	541

Dari jumlah perkara tersebut di atas yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak **541** perkara. Sementara tahun 2016 berjumlah 581 berikut rinciannya :

<b>NO.</b>	<b>JENIS PERKARA</b>	<b>PUTUS TAHUN 2016</b>
1	PEMBATALAN PERKAWINAN	-
2	CERAI TALAK	48
3	CERAI GUGAT	214
4	DISPENSASI KAWIN	22
5	HIBAH	-
6	PENETAPAN AHLI WARIS	-
7	WALI ADHOL	-
8	KEWARISAN	-
9	ITSBAT NIKAH	226
10	HARTA BERSAMA	-
11	PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA	-
12	PENGANGKATAN ANAK	-

13	PERKARA DICABUT	22
14	PEKKARA DITOLAK	6
15	GUGUR	9
16	DICORET	26
17	TIDAK DITERIMA	8
J U M L A H		581

***B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B***

Perkara kasus perceraian di kabupaten Bantaeng berdasarkan rekapitulasi data dari tahun 2015 - 2016 memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan dari jumlah 528 sampai pada jumlah 541.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perceraian di kabupaten bantaeng adalah :

**a. Ekonomi**

Salah satu faktor penyebab perceraian adalah problem ekonomi. Bahkan persoalan ekonomi ini mewarnai sebagian besar kasus perceraian yang terjadi. Sejumlah kasus juga memperlihatkan bahwa sebagian besar problem pernikahan berpangkal pada persoalan ini. Dengan kata lain, problem ekonomi sebabkan perceraian dan menjadi faktor penentu keutuhan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga.

Pertengkaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga maupun suami yang tidak bertanggung jawab, kalau dilihat lebih detail, terutama dipicu oleh kebutuhan ekonomi ini. Latar belakang ini diperkirakan mencapai 60 – 75 persen sebagai penyebab perceraian dalam rumah tangga di Indonesia.

Meski unsur ekonomi bukan penyebab utama terjadinya perceraian, namun harus diakui bahwa kebutuhan ekonomi merupakan hal yang cukup utama bagi terjaganya ketahanan keluarga. Sebuah rumah tangga yang dibangun tentunya untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupannya. Selain kebutuhan ekonomi sebagai ukuran nyata, keluarga dibangun juga untuk mendapatkan ketenangan, baik secara psikologis maupun secara biologis.

Mengukur kebutuhan ekonomi sebuah rumah tangga tidak cukup dengan mengambil parameter kebutuhan fisik atau hidup minimum (KFM/KHM), seperti ketentuan yang dikeluarkan pemerintah begitu juga ukuran upah minimum regional (UMR) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ternyata jauh dari cukup.

Faktor ekonomi merupakan alasan pihak istri menggugat suaminya terhitung pada akumulasi data angka cerai gugat menduduki angka tertinggi dari kasus perceraian yang lain.<sup>3</sup>

#### **b. Perselingkuhan**

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan primernya. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

---

<sup>3</sup> Dra. Hj. St. Nuraeni, *Wawancara* dengan Panitia Muda Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.32.

Perselingkuhan merupakan faktor kedua yang paling banyak mempengaruhi peningkatan jumlah perceraian hal ini sesuai pemaparan dalam proses wawancara dengan Dra. Hj. Nawiah selaku wakil panitera yang menyampaikan bahwa jumlah paling banyak adalah kasus cerai talak dan pemicu dari adanya gugatan adalah adanya orang ketiga yang membuat suami menceraikan istri .<sup>4</sup>

Berikut dari beberapa sumber peneliti menyertakan beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan.

- a. Minimnya Pemahaman Beragama Dan Muraqabatullah (Merasa Diawasi Oleh Allah)

Seseorang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmunya, orang yang bertakwa, lagi sadar dan waspada, tentunya mengetahui bahwa ada malaikat pencatat amal yang senantiasa menuliskan segala tindakan yang dia perbuat dalam catatan mereka, dan ada Allah yang senantiasa terjaga, tidak pernah tidur, dan tidak pernah lalai dalam mengawasi segala gerak-geriknya dari atas ‘Arsy sana.

Dia sadar, bahwa segala perbuatannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan seluruh makhluk ketika hari pembalasan tiba. Oleh karena itu dia berusaha menjaga tindak-tanduknya agar berada dalam lini koridor syariat karena dia memahami bahwa dari atas ‘Arsy-Nya, Allah dapat melihat segala hal yang nampak dan tersembunyi dari makhluk ciptaan-Nya, dan dia juga mengerti bahwa ada balasan atas apa yang telah dikerjakannya di dunia, berupa surga dan neraka.

---

<sup>4</sup> Dra. Hj. St. Nuraeni, *Wawancara* dengan Panitra Muda Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11. 32.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Anbiya' ayat 23/ 21: 23

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya: "Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya."<sup>5</sup>

Allah *Ta'ala* berfirman berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 36/ 17: 36

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya".<sup>6</sup>

Bandingkan keadaan di atas dengan orang yang minim pemahaman agama. Yang terjadi adalah: dia akan merasa enak-enak saja memandangi, mendengar, mencium, menjamah sesuatu yang tidak halal baginya. Dia dengan tanpa rasa berdosa, berbuat maksiat dan zina dengan berbagai variannya. Melakukan kedurhakaan pada Allah tanpa mengingat mati, siksa kubur, hari pembalasan, dan adanya balasan Allah berupa surga-neraka. Dia merasa santai-santai saja berkubang dalam maksiat dan dosa. Aduhai... kita lihat bukan, betapa jauh perbedaan di antara keduanya.<sup>7</sup>

- b. Minimnya komitmen berumah tangga dan kedewasaan berpikir dalam mempertahankan pernikahan.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Anbiya' ayat 23/ 21: 23, h. 567.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Isra' ayat 36/ 17: 36, h. 345.

<sup>7</sup>Saufa Jamilah, S.H, *Wawancara* dengan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.



Kurang matangnya pola pikir seseorang mengenai konsep rumah tangga, juga mengambil peran yang besar dalam memicu perselingkuhan. Ia tidak mau terlalu dibebani dan terikat dengan tanggung jawab serta konsekuensi dalam komitmen berumah tangga. Dalam pikirannya, pernikahan tidak lain hanya sebatas ajang penyaluran nafsu biologis tanpa diiringi adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam rumah tangga. Walhasil, dia hanya mau “enak-enakan” saja dan “bermain-main” sebagaimana kondisinya ketika berada dalam masa lajangnya.<sup>8</sup>

c. Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita

Adanya *ikhtilath* (campur baur antara lelaki dan wanita) di manapun terlebih di kantor, semakin membuka ruang gerak perselingkuhan. Betapa banyak percikan perselingkuhan tercipta dari obrolan ringan antara rekan sejawat, dilanjutkan saling curhat tentang masalah rumah tangga, lalu timbul perasaan iba/kasih/simpatik, hingga tumbuh benih-benih cinta berdasarkan nafsu di dalam jiwa. Belum lagi dibarengi pergi atau makan bersama, tugas ke luar kantor bersama, lalu klimaksnya adalah bergumul di ranjang bersama. *Wal'iyadzubillah*.

Tidak beda halnya dengan pelaku perselingkuhan di dunia maya, yang biasanya memulai perselingkuhannya dengan saling sapa, lempar canda di komentar, atau saling like status, berlanjut mujuk asyik masyuk di *inbox Facebook; BBM; Whatsapp* atau media lainnya.<sup>9</sup>

d. Kurang tercapainya kepuasan dalam perkawinan (*marital dissatisfaction*).

---

<sup>8</sup>Isma, S. Sos, M. Si, *Wawancara* dengan Staf Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.

<sup>9</sup>Soenandar, A.Md, *Wawancara* dengan Staf Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.

Setiap insan, tentu memiliki keinginan yang dia harapkan dari pasangan. Entah keinginan tersebut berhubungan dengan kondisi fisik pasangan (kepuasan lahir), atau keinginan terpenuhinya kebutuhan yang berkaitan dengan perasaan (kepuasan batin). Apabila kebutuhan tersebut tidak bisa tercapai dalam suatu perkawinan, maka kondisi ini akan memicu kurangnya kepuasan dalam perkawinan.

Ketika tidak ada komunikasi efektif dan media saling memahami yang terjalin di antara pasutri, perasaan kurang puas yang dibiarkan berlarut-larut ini tentu akan menimbulkan kekecewaan dalam diri pasangan yang merasa dirugikan. Saat itulah pasangan yang merasa dikecewakan dan kurang mendapatkan kepuasan -serta kurang beriman dan bertakwa- ini akan mencarinya di luar kehidupan pernikahan, yang terbingkai dalam kerangka perselingkuhan.

Pasutri yang mengenyam kebahagiaan dan meraih kepuasan dalam pernikahan pun ada yang berselingkuh, apalagi yang memang kurang mendapat kepuasan dalam perkawinan. Sebenarnya ada banyak penyebab perselingkuhan akibat adanya rasa kurangnya kepuasan dalam suatu perkawinan. Beberapa hal yang bisa memicu kurangnya kepuasan dalam rumah tangga adalah: fisik pasangan kurang menarik seperti sedia kala sehingga cinta pun berkurang, kurang terpenuhinya kepuasan biologis, kurang perhatian dan pengertian dari pasangan, kurang kasih sayang dari pasangan, kurang mendapat penghargaan dari pasangan, akhlak pasangan yang kurang baik, ketidakcocokan dalam visi; misi; prinsip hidup (Insyallah untuk poin ini akan dijadikan bahasan tersendiri).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Drs. Machmud, *Wawancara* dengan Sekertaris Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal April. 2018.

e. Kepribadian Narsistik (*Narcissistic Personal Disorder/NPD*).

Penderita NPD sebenarnya justru memiliki rasa penghargaan diri yang rendah, sehingga dia mencari pengakuan, pujian dan penghargaan dari orang lain. Ini dapat menjadi pemicu perselingkuhan karena dia ingin sebanyak mungkin diakui, dipuji, dan diangkat harga dirinya oleh orang lain.<sup>11</sup>

f. Tidak Menundukkan Pandangan

Dari mana datangnya lintah... dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta... dari mata turun ke hati. Mata ibarat dusta, sedangkan hati sebagai rajanya. Betapa banyak cinta itu bermula, hanya karena pandangan mata yang sungguh menggoda. Hingga lambat laun bergerak, menjalar, dan mengakar di dalam dada.

g. Bosan

Perkawinan yang telah berlangsung lama, disertai dengan kesibukan dan aktivitas yang relatif bersifat monoton begitu saja sehari-harinya, dapat menimbulkan kebosanan bagi jiwa dan cinta. Ibarat "*Bertemu muka itu lagi...itu lagi. Kamu terus...kamu terus... bosan saya jadinya.*". Kebosanan ini akan memicu seseorang untuk mencari pergantian suasana lain yang tidak terdapat dalam kehidupan perkawinan dengan pasangan sahnya. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan reformasi cinta dengan memperbaharui perkawinan Anda dan melakukan penyegaran cinta dalam hidup berumah tangga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Haripuddin,S.H, *Wawancara* dengan Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 5 April. 2018.

<sup>12</sup>Ansor, *Wawancara* dengan Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 5 April. 2018.

#### h. Pelarian dari Tekanan Masalah dalam Rumah Tangga

Pertengkaran, himpitan beban kehidupan, konflik rumah tangga, tuntutan pekerjaan, dan seabrek *stressor* (penyebab stres) kerap kali membuat seseorang mencari pelarian sekejap dari masalahnya. Alih-alih mendinginkan pikiran, merenung, dan mencari jalan keluar, orang-orang seperti ini malah mencari kesenangan semu di balik topeng sandiwara perselingkuhan. Pilihan bertindak semacam ini adalah dampak sampingan dari tipe pribadi yang kurang komitmen terhadap syariat, kurang matang, dan kurang memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan rumah tangga.

Kalaulah dia merupakan pribadi shalih yang matang dan berkomitmen tinggi dalam rumah tangga, dia akan berusaha menyelesaikan dan mencari pemecahan atas masalah yang dihadapinya. Dia akan mencoba mencari akar persoalan, mengurai satu persatu simpul benang permasalahan hingga lama kelamaan benang itu kembali terurai dengan baik dan sempurna sesuai dengan syariat. Bukan malah mencari jalan pintas yang praktis, untuk sekadar rehat sejenak dari pusaran masalah rumah tangga<sup>13</sup>

#### i. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Saat ini ada banyak sekali remaja yang terjebak dalam pernikahan dini, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi

---

<sup>13</sup> Andi Suardi, S.Ag, *Wawancara* dengan Panmud Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 6 April. 2018.

keluarga. Indonesia menempati peringkat ke-37 negara dengan persentase pernikahan dini yang tinggi di dunia, serta tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Riset kesehatan dasar 2010, sekitar 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia terikat pernikahan, sementara hasil survei demografi dan kesehatan tahun 2012 menunjukkan 10 persen remaja usia 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama.

Padahal perkawinan yang dilangsungkan pada usia seperti ini akan banyak menimbulkan dampak dan berakibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan itu, seperti : pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurang dewasa dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan meningkatnya angka perceraian di daerah tersebut. Kenyataan seperti ini apabila dilanjutkan bukannya akan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah*, akan tetapi akan semakin menjauh dari tujuan utama perkawinan yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang, dan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat.

Sedangkan dalam perundangan-undangan di Indonesia sendiri sudah jelas tertulis peraturan yang memuat usia seseorang yang sudah dikatakan mampu untuk menikah. Seperti dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun,

harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.

Rata-rata usia pernikahan yang baik adalah 25 tahun untuk wanita dan 27 tahun untuk pria. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, terutama terhadap wanita itu sendiri. Karena pernikahan dini artinya, menikah disaat usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi.

Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, seperti dari segi psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Namun dengan adanya dispensasi nikah tidak sedikit kasus pernikahan dini terjadi, dengan dalih bahwa lebih banyak mudarat ketika seorang anak tidak segera dinikahkan. Kematangan sikap belum ada sehingga sikap labil seorang anak terkadang menjadi pemicu perceraian.

Salah satu dampaknya ialah usia pernikahan sangat singkat oleh ibu sitti johar selaku hakim di pengadilan agama mengatakan bahwa bahkan ada satu kasus dimana seorang anak yang melakukan pernikahan hanya bertahan sebulan kemudian melakukan perceraian. Itu menjadi gambaran betapa pernikahan dini sangat rentang mengalami perceraian.<sup>14</sup>

### c. Perjodohan

Perjodohan sebagai salah satu faktor penyebab perceraian disini dilihat dari kesediaan pasangan menerima perjodohan. Banyak kasus perjodohan yang berakhir dengan perceraian disebabkan karna adanya paksaan dari pihak keluarga.

Perjodohan yang dipaksakan atau atas kehendak orang tua mereka biasanya disebut dengan bahasa lain 'kawin paksa', yaitu dimana seorang laki-laki dijodohkan kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya dengan keterpaksaan, atau tekanan dari orang tua salah satu diantara mereka, atau dengan kata lain perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak adanya kemauan sendiri (atas desakan, atau tekanan dari kedua orang tua mereka).

Perjodohan dalam istilah fiqh lebih dikenal sebagai suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atau adanya kesewenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita dan merupakan gejala sosial ditengah masyarakat. Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbulnya perjodohan, dalam hal ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu : adanya sebuah ikatan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika dewasa, ada juga faktor dari

---

<sup>14</sup>H. Erwin Amir Betha,S.H, *Wawancara* dengan Panmud Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 6 April. 2018.

keluarga, ataupun dari pihak calon yang hendak dijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi dikalangan masyarakat sekitarnya.<sup>15</sup>

Memang ada beberapa ulama yang menyebutkan dalam pendapatnya bahwa boleh serta tidaknya memaksa anak gadis untuk menikah serta mengikuti apa kata atau perintah orang tua mereka, ini menurut pendapat imam malik dan imam syafi'i al-kharaqi dan Al-Qadhi. Lalu ada juga beberapa ulama mengatakan atau berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak untuk memaksakannya dalam suatu pernikahan anak gadisnya atau dalam hal ini disebut perjodohan hal ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Abu bakar abdul aziz bin ja'far.

#### **d. Rendahnya Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan dikatakan oleh Dra. Hj. St nuraeni selaku panitera muda menyatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian, pasangan yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah lebih rentang mengalami keretakan rumah tangga ini terbukti dengan banyaknya kasus yang masuk dengan rata rata pasutri berpendidikan rendah.

Pendidikan rendah umumnya terjadi karna kurangnya biaya orang tua, sehingga harus putus sekolah. Hal ini juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan muda karna orang-orang di daerah cenderung merasa lebih aman dengan menikahkan anak mereka ketika telah putus sekolah.

### **C. Upaya Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam Menangani dan Menekan Jumlah Kasus Perceraian**

Upaya hakim pengadilan agama bantaeng dalam menangani dan menekan jumlah kasus perceraian ada beberapa langkah.

---

<sup>15</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 54.



## 1. Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihakpihak yang bersengketa. *Berada di tengah* juga bermakna sebagai mediator, karena ia harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa).

Hal ini dilakukan pula oleh pengadilan agama bantaeng kepada para pihak yang ingin melakukan perceraian, mediasi diharapkan sebagai satu langkah untuk menyatukan kembali kedua belah pihak yang ingin bercerai dan membatalkan gugatan.

## 2. Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin

Salah satu upaya pengadilan agama dalam menekan jumlah perceraian adalah dengan bekerja sama dengan KUA mengadakan pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin, ini sangat penting selain untuk menekan angka perceraian juga untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini meningkat. Setiap orang yang mengikuti program itu nantinya akan diberikan kesiapan mental dan wawasan kepada calon pengantin di KUA.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Dra.Sitti Johar, *Wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 18 April. 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya Kasus perceraian di pengadilan Agama Bantaeng adalah Ekonomi, Perselingkuhan, Perjudian dan Rendahnya pendidikan.
2. Upaya hakim pengadilan agama bantaeng dalam menangani dan menekan jumlah kasus perceraian adalah

- a. Mediasi.

Hal ini dilakukan oleh pengadilan agama bantaeng kepada para pihak yang ingin melakukan perceraian, mediasi diharapkan sebagai satu langkah untuk menyatukan kembali kedua belah pihak yang ingin bercerai dan membatalkan gugatan.

- b. Pendidikan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin

Salah satu upaya pengadilan agama dalam menekan jumlah perceraian adalah dengan bekerja sama dengan KUA mengadakan pendidikan pra-nikah bagi calon pengantin, ini sangat penting selain untuk menekan angka perceraian juga untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini meningkat. Setiap orang yang mengikuti program itu nantinya akan diberikan kesiapan mental dan wawasan kepada calon pengantin di KUA.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan implikasinya sebagai berikut:

1. Para hakim dalam menangani kasus gugatan perceraian diharapkan untuk tidak memudahkan perceraian dan berusaha untuk mengakurkan kembali kedua pasangan.
2. Diperlukan sosialisasi kembali kepada para CALON PENGANTIN tentang pendidikan pra nikah yang di lakukan oleh KUA.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia.(Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 2005)
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon,(Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon,.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*,(Juz VI, Semarang: Toha Putra).
- Abu Daud, Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr al-Azadi al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Cet. I; Bairut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.).
- Amir Betha,S.H, H. Erwin. *Wawancara dengan Panmud Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 6 April. 2018.*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Cet II; Jakarta: Kencana, 2006).
- Ansor. *Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 5 April. 2018.*
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Artikel perceraian <https://www.scribd.com/doc/257942953/Artikel-Perceraian> (14 Agustus 2017).
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*,(Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995).
- Drs. Machmud. *Wawancara dengan Sekertaris Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal April. 2018.*
- Faktor umum penyebab perceraian <http://www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebab-umum-terjadi-perceraian.html> (14 agustus 2017).
- Farah, Adibul. *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian*,(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl),(Semarang:IAIN Walisongo, 2008).
- Fuad Said, H.A. *Perceraian Menurut Hukum Islam*,(Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*,(Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008).

- Hamdani. *Risalah Nikah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Haripuddin, S.H. *Wawancara* dengan Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 5 April. 2018.
- <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018 pukul 15.00 WITA).
- Isma, S. Sos, M. Si. *Wawancara* dengan Staf Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.
- Jamilah, S.H, Saufa. *Wawancara* dengan Panitra Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.
- Johar, Dra.Sitti. *Wawancara* dengan Hakim Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 18 April. 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantaeng 2017
- Nuraeni, Dra. Hj. St. *Wawancara* dengan Panitra Muda Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11. 32.
- Pengadilan Agama Bantaeng Tgl 4 April 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19) *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 113) Wacana Intelektual, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, (Cet. I; Volume 1; Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Soenandar, A.Md. *Wawancara* dengan Staf Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 14 April. 2018.
- Suardi, S.Ag, Andi. *Wawancara* dengan Panmud Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B pada tanggal 6 April. 2018.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibjo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. 34; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Syaifuddin dkk, Muhammad. *Hukum Perceraian*, (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- Syaifuddin, dkk, Muhammad. *Hukum Perceraian*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

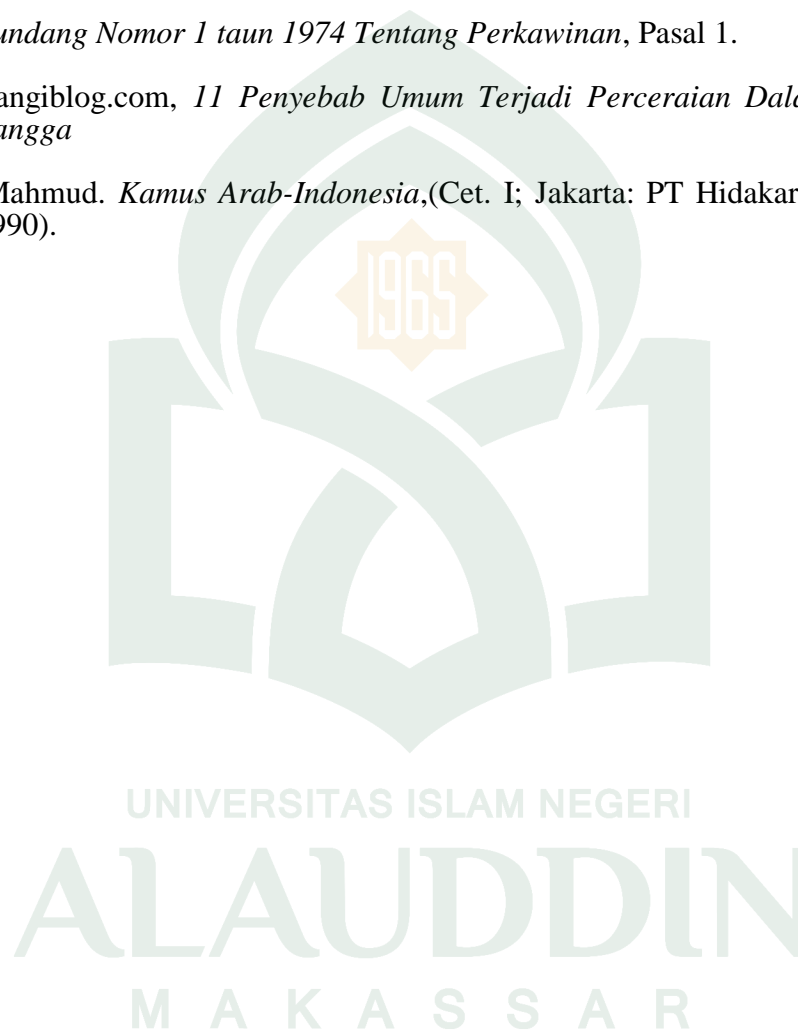
Tihami, H.M.A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Tim Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VI; Bandung: Citra Umbara).

*Undang-undang Nomor 1 taun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.*

[www.pelangiblog.com](http://www.pelangiblog.com), *11 Penyebab Umum Terjadi Perceraian Dalam Rumah Tangga*

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“SIGNIFIKASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG KELAS II B (STUDI KASUS 2015-2016)”** bernama lengkap **RISWAN. R**, Nim: **10100113062**, Anak ke pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rasidong dan Ibu Rahma yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1994 di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 35 Lannyang pada tahun 2000-2006, kemudian menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bissappu pada tahun 2007-2010. Penulis pun melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bantaeng pada tahun 2010-2013. Barulah pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan mengambil Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan Peradilan.

Selama menyandang status Mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus di Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2015-2016. Penulis juga aktif di dunia pergerakan. Penulis terlibat secara aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Jadi pengurus Cabang Hmi Gowa Raya periode 2016-2018 Dan terlibat aktif di Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi Dan Hukum (SIMPOSIUM) Serta aktif di lembaga Kedaerahan Himpunan Pelajar Mahasiswa

Bantaeng Raya (Hpmb Raya) sebagai Sekretaris Umum cabang 2015-2016 dan jadi Pengurus Besar 2017-2018.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini.

